

Ikatan Alumni UI (Iluni) menilai potensi pendapatan dari sektor pelayaran nasional saat ini masih belum optimal karena sebagian besar pendapatan tersebut masih dinikmati perusahaan pelayaran asing yang menguasai pengangkutan minyak bumi dan gas, batubara serta "offshore".

Jakarta, 27/3 (Regional.Roll) - Ikatan Alumni UI (Iluni) menilai potensi pendapatan dari sektor pelayaran nasional saat ini masih belum optimal karena sebagian besar pendapatan tersebut masih dinikmati perusahaan pelayaran asing yang menguasai pengangkutan minyak bumi dan gas, batubara serta "offshore".

"Padahal dari sektor ini bisa diperoleh pendapatan hingga Rp147 triliun pertahun," ujar Wakil Ketua Iluni Fakultas Teknik UI Agus Muldy dalam diskusi terbatas praseminar "Indonesian Cabotage Forum 2009" di Sekretariat Ilunit FTUI Salemba, Jakarta, Jumat.

Indonesia sebagai negara maritim, katanya, sebenarnya telah memberlakukan asas "cabotage" atau hak istimewa bagi suatu negara yang memiliki wilayah perairan untuk melakukan pengangkutan barang keperluan dalam negeri dengan kapal-kapal berbendera nasional.

"Dengan berlakunya azas cabotage ini, seharusnya industri pelayaran nasional bisa berkembang pesat dan bisa menjadi salah satu sektor yang diandalkan sebagai sumber pendapatan nasional, mengingat indonesia adalah negara kepulauan dan luas lautannya mencapai 70 persen wilayah." ujarnya.

Agus menambahkan, negara-negara maritim di dunia seperti Jepang, Jerman, Prancis telah menerapkan Cabotage itu dan bahkan, Amerika Serikat yang menjadi pelopor liberalisme dan perdagangan bebas pun menerapkan prinsip ini.

Sementara itu, Ketua Bidang Pengkajian Maritim Iluni FTUI Idris Sikumbang menjelaskan, industri pelayaran di luar negeri seperti di AS mendapat dukungan penuh dari perbankan nasionalnya. Sementara hal itu tidak terjadi di Indonesia.

"Akan sulit bagi pengusaha nasional untuk membeli kapal pengangkut oil dan gas jika tidak mendapat kucuran kredit dari perbankan nasional. Kalau ini dibiarkan, maka kapal-kapal asing lah yang terus mengeruk keuntungan meski ada asas cabotage," ujar Idris

Karena itu, ia menambahkan, untuk mengimplementasikan pemberdayaan pelayaran nasional diperlukan konsolidasi yang lebih serius dari semua kementerian yang terkait.

"Perlu koordinasi antara Menko Perekonomian, Departemen keuangan dan Bank indonesia untuk mendorong jalannya pendanaan untuk sektor maritim ini," ujar Ketua Panitia Indonesian Cabotage Advocation Forum Uly R Putra.

Rencananya, Menko Perekonomian Sri Mulyani, Meneg BUMN Sofyan Djailil dan Menteri

Perhubungan Jusman Syafii Djamal akan membahas masalah ini dalam "Indonesian Cabotage Advocation Forum" yang diselenggarakan di hotel Borobudur pada 31 Maret nanti.

(T.D011/